

## **MASKULINITAS: Posisi Laki-Laki dalam Masyarakat Patriarkis**

**Muhadjir Darwin**

### **Pendahuluan**

Ada yang bilang bahwa Monumen Nasional (Monas) yang berdiri tegak di jantung kota metropolitan Jakarta adalah simbol kejantanan laki-laki. Perancang bangunan itu sendiri, Presiden I RI Soekarno, adalah sosok lelaki ideal dalam imajinasi orang Jawa: *lelanning jagad* yang sakti, tampan dan banyak istri, seperti arjuna, tokoh pandawa dalam cerita pewayangan, yang selalu menang di setiap medan perang, dan selalu memenangkan hati setiap dewi. Presiden II RI Soeharto, adalah juga gambaran ideal lelaki Jawa. Soeharto hadir dalam 32 tahun pemerintahan Orde Baru bak raja diraja yang sangat berkuasa dan kaya raya. Dalam imajinasi orang Jawa, lelaki ideal adalah yang memiliki *benggol* (uang) dan *bonggol* (kejantanan seksual). Lalu di mana posisi perempuan? Ia adalah milik laki-laki, sejajar dengan *bondo* (harta), *griyo* (istana), *turonggo* (kendaraan), *kukilo* (burung, binatang piaraan, bunyi-bunyian), dan *pusoko* (senjata, kesaktian). Penguasaan terhadap perempuan (*wanita*) adalah simbol kejantanan seorang lelaki. Sebaliknya, pada perempuan tidak ada independensi. Ketundukan, ketergantungan, dan kepasrahan perempuan atas laki-laki adalah gambaran kemuliaan hati seorang perempuan Jawa.

Hegemoni laki-laki dalam masyarakat tampaknya merupakan fenomena universal dalam sejarah peradaban manusia di masyarakat manapun di dunia. Secara tradisional manusia di berbagai belahan dunia menata diri atau tertata dalam bangunan masyarakat patriarkis. Pada masyarakat seperti ini, laki-laki diposisikan superior terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan, baik domestik ataupun publik. Hegemoni laki-laki atas perempuan memperoleh legitimasi dari nilai-nilai sosial, agama, hukum negara, dan sebagainya, dan tersosialisasi secara turun-temurun, dari generasi ke generasi.

Ideologi patriarki adalah merupakan salah satu variasi dari ideologi hegemoni, suatu ideologi yang membenarkan penguasaan satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Dominasi kekuasaan seperti itu dapat terjadi antar kelompok berdasarkan perbedaan antar jenis kelamin, agama, ras, atau kelas ekonomi. Ada 3 asumsi penting yang mendasari ideologi ini:

1. Kesepakatan-kesepakatan sosial yang sesungguhnya hanya menguntungkan kepentingan kelompok yang dominan cenderung dianggap mewakili kepentingan semua orang

2. Ideologi hegemonis seperti ini merupakan bagian dari pemikiran sehari-hari, cenderung diterima apa adanya (*taken for granted*) sebagai sesuatu yang memang demikianlah semestinya
3. Dengan mengabaikan kontradiksi yang sangat nyata antara kepentingan kelompok yang dominan dengan kelompok subordinat, ideologi seperti ini dianggap sebagai penjamin kohesi dan kerjasama sosial, sebab jika tidak demikian yang terjadi justru suatu konflik (Pyke, 1996)

Ketika hubungan antar individu didominasi oleh ideologi hegemonis, kelompok yang tersubordinasi tidak mempunyai ruang yang memadai untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki, dan memenuhi secara optimal semua keinginan dan harapannya. Seiring dengan tumbuhnya paham individualisme dan demokrasi, tata masyarakat yang diatur menurut ideologi hegemonis seperti ini kemudian dianggap problematis, lalu muncul proses untuk menata ulang masyarakat kedalam pola hubungan yang lebih egalitarian, yang tidak membedakan individu dari latar belakang seks, ras, agama, dan kelas ekonomi.

Dalam konteks hubungan gender, modernisasi kemudian tercermin salah satunya dari perluasan hak perempuan sebagai manusia merdeka dan kesamaan hak yang dimiliki perempuan dalam berbagai aspek kehidupan domestik dan publik, termasuk hak politik, hak pendidikan, hak memperoleh pekerjaan, hak kesehatan reproduksi, dll.

Tanpa mengabaikan kemajuan yang sudah tercapai sejauh ini, secara umum harus diakui bahwa kultur patriarkis belum diakui sepenuhnya hapus dari masyarakat modern saat ini. Kesimpulan seperti ini juga berlaku untuk membaca masyarakat Indonesia masa lalu maupun masa kini. Secara keseluruhan masyarakat Indonesia adalah masyarakat patriarkis. Sistem patriarkis di Indonesia menggejala baik pada masyarakat yang menganut sistem keluarga patrilineal (misalnya Batak), bilateral (Jawa), maupun matrilineal (Minang). Bahwa masyarakat dengan sistem keluarga patrilineal dan bilateral bersifat patriarkis kiranya tidak sulit untuk dijelaskan. Tetapi sekilas terlihat aneh bahwa masyarakat Minang yang menganut sistem keluarga matrilineal ternyata juga bersifat patriarkis. Tetapi begitulah kenyataannya, dimasyarakat tersebut meskipun pemilikan dan pewarisan harta keluarga mengalir dari garis keturunan perempuan, pengambilan keputusan keluarga dalam banyak tidak berada pada ibu, tetapi pada *ninik mamak*, yaitu saudara laki-laki ibu.

Tata masyarakat patriarkis seperti ini digugat oleh kaum feminis sebagai tidak adil, karena cenderung meminggirkan posisi perempuan. Perempuan cenderung diposisikan sebagai subordinat, dikotakkan kedalam dunia domestik, dan dibatasi haknya untuk masuk kedalam dunia publik, padahal perempuan dan laki-laki memiliki potensi sama dan karena itu seharusnya mempunyai hak yang sama pula. Di Indonesia gugatan seperti ini sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Surat-surat Kartini di akhir abad ke-19 telah secara menonjol mencerminkan pandangan feminis

demikian. Dalam perkembangan berikutnya muncul banyak tokoh perempuan yang memperjuangkan nasib dan kedudukan perempuan di masyarakat. Dalam sepuluh tahun terakhir suara perempuan kembali terdengar lebih nyaring lewat berbagai gerakan aktivis perempuan yang dialamatkan ke berbagai isu sosial seperti ketenagakerjaan, kesehatan reproduksi, politik, ekonomi, agama, seni, dan sebagainya.

Meskipun gugatan terhadap subordinasi dan marginalisasi perempuan oleh laki-laki telah disuarakan dengan lantang, dominasi laki-laki diberbagai sektor masyarakat tetap tak tegoyahkan. Tampaknya suara perempuan ini kurang keras gaungnya di telinga laki-laki, bahkan barangkali di telinga kaum perempuan sendiri. Secara statistik, mungkin lebih banyak perempuan yang tidak begitu *concern* pada kesetaraan gender dibanding yang memperjuangkannya. Terlebih lagi di kalangan laki-laki, sangat sedikit yang mempercayai ketimpangan gender sebagai isu sosial yang perlu diperhatikan. Kebanyakan justru mengeksploitasi situasi ketimpangan gender untuk mengejar tujuan sosial atau tujuan pribadi lain yang dianggap lebih penting. Mungkin itu karena masalah kesetaraan gender lebih banyak disorot dari sisi perempuan, pengorbanan yang dialami perempuan, jarang dari sisi laki-laki, yaitu persoalan khas yang dihadapi laki-laki dalam masyarakat patriarkis. Tampaknya disamping diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai isu laki-laki, sehingga diskursus tentang isu gender dalam masyarakat patriarkis dapat dilakukan secara lebih seimbang menuju tercapainya masyarakat yang lebih fleksibel dan egalitarian.

## **Maskulinitas**

Salah satu cara untuk membahas isu laki-laki dalam masyarakat patriarkis adalah dengan membedah atau melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap konsep maskulinitas, dan mengkaitkan konstruksi sosial baru tersebut dengan perubahan sosial yang lebih menyeluruh, yaitu proses pelembagaan hubungan sosial yang egalitarian.

Maskulinitas adalah suatu *stereotype* tentang laki-laki yang dapat dipertentangkan dengan femininitas sebagai *stereotype* perempuan. Maskulin vs feminim adalah dua kutub sifat yang berlawanan dan membentuk suatu garis lurus yang setiap titiknya menggambarkan derajat kelaki-lakian (maskulinitas) atau keperempuanan (femininitas). Seorang laki-laki yang memiliki karakteristik yang identik dengan *stereotype* maskulin disebut laki-laki maskulin, jika karakteristik berlebihan disebut laki-laki super maskulin, jika kurang disebut laki-laki kurang maskulin atau laki-laki feminim. Demikian sebaliknya, jika dibaca variasi sifat seorang perempuan.

*Stereotype* maskulinitas dan femininitas mencakup berbagai aspek karakteristik individu, seperti karakter atau kepribadian, perilaku peranan, okupasi, penampakan fisik, ataupun orientasi seksual. Jadi misalnya laki-laki dicirri oleh watak yang terbuka, kasar, agresif, dan rasional, sementara perempuan bercirikan tertutup, halus, afektif,

dan emosional. Dalam hubungan individu laki-laki diakui maskulinitasnya jika terlayani oleh perempuan, sementara perempuan terpuaskan feminitasnya jika dapat melayani laki-laki. Dalam hal okupasi pekerjaan yang mengandalkan kekuatan dan keberanian seperti tentara, sopir, petinju, dsb, disebut sebagai pekerjaan maskulin, sementara pekerjaan yang memerlukan kehalusan, ketelitian, dan perasaan seperti salon kecantikan, juru masak, menjahit, dsb, dinamakan pekerjaan feminim.

Stereotype inilah yang pada gilirannya menciptakan hubungan yang bias antara laki-laki dan perempuan, dimana hegemoni laki-laki atas perempuan dianggap sesuatu yang kodrati. Menjadi jelas pula disini bahwa tanpa melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap konsep maskulinitas, disamping sudah barang tentu dekonstruksi konsep feminitas, hubungan laki-laki dan perempuan yang egalitarian sulit terwujud.

### **Rekonstruksi Maskulinitas**

Namun perlu dicatat bahwa maskulinitas dan feminitas bukanlah konsep dengan dimensi kategori tunggal. Ada berbagai bentuk maskulinitas dan feminitas. Artinya konsep tersebut bervariasi antar masyarakat, kelas sosial, maupun tingkat peradaban. Dengan kata lain Maskulinitas dan Feminitas adalah suatu konstruksi sosial yang dapat diberi makna yang berbeda oleh setiap masyarakat. Dengan menyadari maskulinitas sebagai konsep yang multi dimensi, terbuka ruang bagi kita untuk melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi konsep tersebut.

### **Kebapakan (*Fatherhood*)**

Salah satu stereotype maskulinitas yang penting untuk didekonstruksi adalah konsep *fatherhood* (kebapakan). Susan B. Murray (1996) menemukan fenomena di masyarakat Barat yang diteliti bagaimana pekerjaan merawat anak dianggap sebagai pekerjaan yang sarat gender, atau yang lebih spesifik lagi sebagai pekerjaan yang sangat feminim. Kemudian keinginan ayah untuk merawat anak cenderung dicurigai, bahkan dianggap sebagai perilaku patalogis. Sementara itu Ralph LaRose menemukan kecenderungan baru laki-laki Barat saat ini untuk lebih memperhatikan perawatan anak, dan menganggap hal demikian sebagai bentuk modernisasi. LaRossa menyebut kecenderungan ini sebagai "*masculine domesticity*," atau "*domestic masculinity*" dan dibagian lain disebut sebagai proses "*fatherhood evolution*". Proses ini mengarah kepada pembagian kerja di sektor domestik yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan. Harry Brod dalam bukunya *The Making of Masculinity* juga menggugat kecenderungan mengabaikan *fatherhood* sebagai stereotype maskulinitas. Ia menuturkan secara historis bagaimana pada keluarga Barat awal abad ke-19, peranan *fatherhood* dari suami lebih menonjol dibanding peranan *matherhood* seorang isteri. Peranan *fatherhood* dari suami ini kemudian menurun seiring dengan proses industrialisasi. Bahkan buku tersebut mengatakan bahwa dominasi laki-laki di sektor publik adalah merupakan

pelarian laki-laki karena mereka mengalami marginalisasi di sektor domestik. Lalu dia mempertanyakan secara kritis, kenapa statistik hanya menyediakan angka tentang proporsi ibu rumah tangga yang bekerja, tetapi tidak pernah ada angka laki-laki pekerja yang menjalankan fungsi *fatherhoodnya*. Uraian di atas ingin menegaskan bahwa stereotype maskulinitas dapat berarti pengambilan peranan yang seimbang dari laki-laki disektor domestik. Marginalisasi laki-laki di sektor domestik justru harus dilihat sebagai fenomena sosial yang patologis. Rekonstruksi demikian penting untuk menciptakan hubungan laki-laki dan perempuan yang lebih egalitarian.

### **Kekerasan (violence)**

Kekerasan secara tradisional juga merupakan *stereotype* laki-laki. Kata *masculine* sendiri dekat dengan kata *mascle* (otot) yang dapat segera diasosiasikan dengan kekuatan, keprkasaan, kepahlawanan, kekerasan. Pekerjaan militer adalah pekerjaan maskulin karena pekerjaan ini sangat menekankan kekuatan, keperkasaan dan heroisme. Tetapi menarik untuk dicermati bagaimana ketika pemerintah Amerika Serikat tengah terlibat perang Vietnam pada era 60an dan negara mewajibkan pemudanya untuk masuk tentara, sekelompok perempuan di Amerika melancarkan protes dengan menggelar spanduk berbunyi "*girls say yes to guys who say no*" (gadis-gadis berkata ya untuk para pemuda yang berkata tidak). Protes ini menegaskan bahwa heroisme tidak lagi diartikan sebagai keberanian untuk berperang, tetapi keberanian untuk menolak perang. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang cinta damai

Dari sini tampak bagaimana dekonstruksi dan rekonstruksi konsep maskulinitas mempunyai makna yang sangat besar dalam perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih demokrasi dan egalitarian. Upaya demikian juga sangat urgen bagi kita di Indonesia, misalnya dikaitkan dengan proses demokratisasi yang tengah berlangsung saat ini. Dapat dikatakan bahwa sistem politik di Indonesia mempunyai watak maskulin yang kental, dan maskulinitas di sini diartikan dalam pengertian yang konvensional, yaitu politik yang mengutamakan otot, kekuatan, dan kekerasan. Dominasi militer dalam politik, penggunaan pendekatan keamanan dalam mengatasi berbagai gejolak sosial seperti DOM di Aceh, Irian Jaya dan Timor-Timur, kerusuhan oleh massa disertai pelecehan seksual terhadap perempuan, kampanye yang sarat kekerasan, dan sebagainya adalah sebagian dari contoh maskulinitas yang dimaksud. Politik Indonesia juga mencerminkan budaya patriarki di mana laki-laki lebih dominan dalam politik ketimbang perempuan. Ketika seorang tokoh perempuan, Megawati, tampil menjadi kandidat presiden yang menonjol, dalil agama dipakai untuk meniadakan hak politiknya sebagai kepala negara. Tetapi kehadiran Megawati dan popularitas yang diperoleh tidak segera juga dapat ditafsirkan sebagai kemajuan hubungan gender. Megawati tidak pernah menonjolkan perspektif gender dalam setiap pidatonya dan langkah-langkah politiknya, tidak juga menggunakan perspektif ini sebagai argumen untuk membela hak politiknya sebagai pemimpin bangsa. Survey oleh LP3ES menunjukkan bahwa Megawati kurang disukai oleh pemilih perempuan. Proporsi

pemilih perempuan yang memilih PDI-P lebih rendah dibanding proporsi pemilih perempuan yang memilih 4 partai besar lainnya, padahal partai-partai tersebut mencalonkan capres laki-laki, bahkan sebagian diantaranya (seperti PPP, PKB, dan PK) ikut mempersoalkan boleh tidaknya perempuan menjadi presiden. Selanjutnya, PDI-P sendiri dalam kampanye pemilu tampil sangat maskulin karena banyak diwarnai kekerasan, termasuk kekerasan terhadap perempuan.

Semua itu menjadi indikasi bahwa warna politik di Indonesia memang tampil sangat maskulin, nyaris tanpa kritik dari perspektif gender, dan fenomenanya tetap saja seperti itu meskipun pelaku politiknya adalah perempuan. Rekonstruksi maskulinitas dalam panggung politik memang dapat berarti memperluas hak perempuan dalam berpolitik, tetapi juga, dan yang lebih penting dari itu, harus berupa perubahan gaya politik dari penonjolan kepada kekuatan dan kekerasan menjadi pengutamakan pada cara-cara yang lebih damai, adil, dan santun, dari politik yang bernuansa maskulin menjadi politik yang bernuansa feminim.

## **Penutup**

Paper ringkas ini mencoba menjelaskan realitas sosial di mana budaya patriarki menciri kebanyakan masyarakat di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Paper ini juga menjelaskan adanya suatu proses untuk mengoreksi budaya seperti ini, dan hal tersebut terkait dengan proses modernisasi, individualisasi, dan demokratisasi yang melanda masyarakat di berbagai belahan dunia. Indonesia juga tengah mengalami proses seperti ini. Karenanya dalam rangka proses tersebut budaya patriarki perlu dibedah, antara lain dengan cara melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi konsep maskulinitas. Upaya demikian diperlukan agar dapat dikembangkan konsep baru maskulinitas yang lebih fleksibel dan egalitarian. Sosialisasi terhadap konsep baru tersebut diharapkan dapat menyumbang kepada proses modernisasi dan demokratisasi yang tengah berlangsung di masyarakat kita.

## **Bacaan:**

Brod, Harry (ed), *The Making of Masculinities, The New Men's Studies*, Boston: Allen & Unwin, 1987.

Gallagher, Saly K. & Christian Smith, "Symbolic Tradisionalism & Pragmatic Egalitarianism; Contemporary Evangelians, Families, and Gender," *Gender and Society*," Vol. 13, No. 2, April 1999: 211-233.

LaRossa, Ralph, *The Modernization of Fatherhood: A Social and Political History*. Chicago: University of Chicago Press, 1988.

Lips, Hilary, M. *Sex & Gender, An Introduction*, Mountain View, Cal.: Mayfield Publishing Company, 1988.

Murray, Susan B. "We All Love Charles, Men in Child Care and the Social Construction of Gender" *Gender and Society*, Vol. 10, No. 4, August 1996: 368-385.

Pyke, Karen D. "Class Based Masculinities: The Interdependence of Gender, Class, and Interpersonal Power," *Gender and Society*, Vo. 10, No. 5, October 1996: 527-549.